



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HARIS KARIM**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **633519**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.372.619.896**

1. Tanah Seluas 2361 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 475.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 704 m2/16 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 1421 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 2656 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 180.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 314 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 877.000.000
8. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 375.419.896
9. Tanah Seluas 794 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
10. Tanah Seluas 373 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
11. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	127.000.000
1. MOBIL, KIA RIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	129.795.501
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.681.415.397
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.681.415.397

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.